

Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan keterangan sumber "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute"

TEMA : Pilkada Pandemi di antara Kerumunan Massa

Pemateri :

1. Ratna Dewi Pettalolo, Komisioner Bawaslu
2. I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Komisioner KPU RI
3. Rifqi Rachman, Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute

Moderator : Nopitri Wahyuni, Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute

Partisipan : Diskusi ini diikuti oleh sebanyak 32 peserta dengan berbagai latar belakang, seperti pemerintah, media, NGO, dan masyarakat umum lainnya.

PEMBAHASAN

Rifqi Rachman, Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute

- ✓ Di tengah pandemi, kerumunan masa menjadi suatu ancaman.
- ✓ Pada dasarnya, kerumunan merupakan suatu entitas yang memiliki kepentingan. Kerumunan juga memiliki kekuatan untuk strategi electoral.
- ✓ Bawaslu menemukan sejumlah pelanggaran, 316 bapaslون dari 243 daerah melanggar. Kemendagri melayangkan surat teguran termasuk apresiasi kepada daerah yang patuh.
- ✓ Terdapat sejumlah poin, mengapa hal ini penting menjadi perhatian kita. Pertama, berbagai tahapan Pilkada yang ada berpotensi menjadi kluster baru, misalnya saja, pada kluster pendaftaran, kluster simulasi, kluster kampanye, dan kluster pemungutan suara. Pada kluster simulasi juga sudah terjadi kasus.
- ✓ Kedua, soal *tracing*, akan sulit untuk meninjau kluster karena terlalu banyak interaksi. Apalagi rasio tes di Indonesia masih jauh.
- ✓ Dengan ancaman yang besar, bapaslون seharusnya khawatir termasuk Pemda, namun, terkesan Pemda melindungi aktivitas kampanye dan lain-lain. Salah satu pernyataan yang muncul karena euphoria yang tidak bisa ditahan.
- ✓ Berdasarkan analisis Kemendagri, terdapat dua jenis bapaslون, yaitu, yang tahu aturan, tapi tetap mengumpulkan massa dan bapaslون tidak tahu protokol kesehatan di ketentuan Pilkada 2020. Logikanya, mereka harus tahu berbagai aturan yang ada di tengah pandemi.
- ✓ Sebentar lagi penetapan paslon dilakukan, saran untuk tahapan penetapan paslon sudah banyak dilontarkan, seperti pakta integritas. Sementara, kampanye masih mengkhawatirkan, walaupun PKPU sudah dibuat.
- ✓ Opsi penundaan kembali sangat perlu dipertimbangkan karena tren kasus yang tidak bisa diprediksi. Berdasarkan hasil RDP sejumlah *stakeholder*, Pilkada dapat berlangsung jika seluruh tahapan Pilkada berpedoman pada protokol kesehatan dan prinsip demokrasi, namun, melihat fakta yang terjadi berbagai pelanggaran banyak dilakukan.

Ratna Dewi Pettalolo, Komisioner Bawaslu

- ✓ Sejumlah *stakeholder* telah melakukan pertemuan terkait Pilkada di tengah pandemi. Seperti KPU, DKPP, Satgas COVID dan Kemendagri. Pertemuan ini menghasilkan kelompok kerja (pokja) terkait pencegahan dan penanganan kasus. Hal ini dibuat karena memang belum ada peraturan soal kerumunan.
- ✓ Untuk mendukung peraturan tersebut, sudah dibuat payung hukum, namun, baru berbentuk sanksi teguran sehingga perlu dilakukan strategi lain.
- ✓ Melihat tahapan Pilkada, memang identik dengan kumpulan massa. Bertemunya dua kepentingan antara bapaslons dan masyarakat.
- ✓ Di tengah situasi pandemi, suka tidak suka harus ada penyesuaian. Salah satunya dengan mengurangi pengurangan massa dan penerapan sanksi karena ada dua misi yang kami bawa, daulat rakyat dan keselamatan rakyat.
- ✓ Terkait pelanggaran administrasi kami segera merekomendasikan kepada KPU. PKPU memang tidak akan efektif mencegah. Jika dibuat UU waktunya juga tidak memungkinkan, sehingga dimungkinkan pembuatan perppu sebagai payung hukum pencegahan dan penanganan kesehatan.
- ✓ Pemda yang sudah baik juga perlu diapresiasi. Bawaslu berharap, kepolisian dapat menjadi garda terdepan dalam menangani kerumunan massa dan bagaimana menghentikan massa yang melanggar.
- ✓ Pokja yang sudah dibentuk juga telah ditugaskan untuk memetakan potensi-potensi kluster Pilkada di seluruh daerah.

I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Komisioner KPU RI

- ✓ Pilkada tahun ini sangat luar biasa karena semakin banyak daerah yang berpartisipasi. Sejumlah isu pun muncul, tidak hanya elektoral tapi juga kesehatan dominan dibanding substansi penyelenggaraan sendiri, yang mana hal ini memerlukan kerjasama dengan banyak pihak.
- ✓ KPU melakukan sejumlah koordinasi kepada bapaslons agar paham ketentuan Pilkada di tengah pandemic. Jadi, tidak ada alasan tidak tahu peraturan yang sudah dibuat.
- ✓ Sebentar lagi tahapan Pilkada memasuki pemilihan bapaslons, hasilnya akan diumumkan di laman dan papan tanpa mengesampingkan prinsip demokrasi.
- ✓ Kami juga mengingatkan agar bapaslons dan stakeholder terkait harus bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran, karena ini terkait kesehatan masyarakat.
- ✓ Evaluasi terkait penerapan protokol kesehatan hingga tahapan pendaftaran bapaslons juga dilakukan terkait pengabaian terhadap protokol kesehatan yang terjadi, diantaranya, positif saat mendaftar, tidak melampirkan hasil swab test saat mendaftar, tidak ada jaga jarak, terjadi kerumunan massa, pendukung tidak memakai masker, terdapat 60 paslons positif COVID-19 dari 21 provinsi, penyelenggara pemilihan turut terkena kasus positif COVID-19.
- ✓ Isu yang juga muncul, diantaranya, Pemilihan Kepala Daerah memunculkan kluster baru, kerumunan massa pada tahapan kampanye sulit dihindarkan, tidak ada tindakan dari aparat keamanan dan penyelenggara pemilihan, kampanye hanya dilakukan via media daring dan media sosial, penundaan pemilihan kepala daerah 2020 di tengah pandemi.
- ✓ Tantangan terkait protokol kesehatan pada tahapan pemilihan selanjutnya terbagi menjadi empat. Pertama, ketaatan terhadap pelaksanaan protokol Kesehatan di setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan terutama kampanye; Kedua, mencegah kerumunan massa di daerah penyelenggara pemilihan sekaligus menerapkan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku; Ketiga, masyarakat khawatir terpapar COVID-19 sehingga tidak mau datang ke TPS saat hari-H (9 Desember 2020); Keempat, pandemi COVID-19 belum kunjung menunjukkan tren penurunan per September 2020 di berbagai daerah di Indonesia.

- ✓ KPU juga mengingatkan bahwa bapaslons sangat memengaruhi perilaku pendukung, sehingga diharapkan dapat menjadi contoh selama penyelenggaraan.
- ✓ Upaya KPU terkait persiapan dan protokol kesehatan terus dilakukan dalam hampir semua tahapan, prosedur dan tata caranya. Tentu akan efektif jika semua pihak berkomitmen, yaitu, tertib ikut rangkaian dan tertib menjaga protokol kesehatan.
- ✓ KPU RI juga gencar dan proaktif melakukan sosialisasi untuk meyakinkan bahwa pilkada 2020 demokratis, sehat dan aman dengan mengedepankan protokol kesehatan dan mengoptimalkan metode pelaksanaan daring hingga melalui media sosial untuk kampanye hingga hari pemilihan untuk menghindari pertemuan tatap muka.
- ✓ KPU RI juga mendengar masukan dari berbagai pihak terkait evaluasi tahapan pilkada untuk mendapatkan solusi dan mencegah terulangnya pelanggaran terkait protokol kesehatan dalam tahapan pilkada lanjutan.
- ✓ Selanjutnya, KPU RI bekerjasama dengan berbagai pihak terutama Bawaslu RI, Kemendagri dan TNI/Polri sepanjang kegiatan pemilihan 2020 di 9 provinsi dan 270 kabupaten/kota dan Satgas COVID-19 terkait pemberian rekomendasi kegiatan dalam tahapan pemilihan.
- ✓ KPU menyusun PKPU terkait Penyelenggaraan Pemilihan pada Masa Pandemi COVID-19 antara lain PKPU No. 6 Tahun 2020 *jo* PKPU No. 10 Tahun 2020 dan juga perubahan PKPU No. 4 Tahun 2017 yang mengatur larangan dan sanksi terkait pelanggaran-pelanggaran kampanye.

FORUM DISKUSI

1. Ahmad Shobirin, IISIP Jakarta

Untuk Dewa Raka dan Rifqi Rachman:

- 1) Apakah memungkinkan meng-*cut* kampanye konvensional, menghindari kerumunan massa?
- 2) Mungkinkah pemungutan suara dilakukan dua hari?

2. Edo, Universitas Pertahanan RI

Untuk Dewa Raka dan Rifqi:

- 1) Bagaimana strategi di tengah pandemi mencegah kerumunan massa.
- 2) Bagaimana strategi memunculkan *sense of crisis* di tengah pandemi?

3. Luis, Formappi

Untuk Dewa Raka:

Bagaimana mencegah kerumunan di KPUD?

4. M. Surya, Kompas

Untuk Rifqi Rachman:

Bagaimana menanggapi Pilkada sebagai hak konstitusional dan penundaan Pilkada untuk jaminan kesehatan?

Tanggapan

1. Rifqi menjawab Ahmad Shobirin

- Jika ada *cut-off* akan membuka peluang pelanggaran, karena rangkaian Pilkada ini telah direncanakan sedemikian rupa dari segi anggaran dan peraturan-peraturannya yang mengikat.
- Terkait penghitungan suara tidak bisa dilakukan dua hari, kembali lagi adanya celah pelanggaran yang dapat terjadi.

2. Dewa Raka menjawab Ahmad Shobirin

- Dalam UU Pilkada yang dibuat, tahapan kampanye tidak bisa ditiadakan. KPU bisa mengatur kembali di tengah pandemi, itu bisa dilakukan.
- Tidak semua daerah juga mengakses via *online*. Tahapan kampanye tetap, secara filosofis, kampanye soal pemilih mendapat informasi dan bapaslron berhak menyampaikan visi dan misi.
- Kami mendorong kampanye dilakukan melalui media massa, termasuk media cetak dan radio, termasuk daring.
- Selain itu, Pilkada juga tidak bisa dilakukan dua hari karena telah diatur berbagai kebijakannya. Namun, kami melakukan

3. Dewa Raka menjawab Edo

- Kami berharap melalui upaya KPU, KPU mengatur secara lebih tegas sesuai prinsip *luber jurdil*.
- Sanksi juga diberikan terkait pelanggaran serius. Ini memerlukan strategi semua pihak.

4. Dewa Raka menjawab Luis

- KPU sudah mengarahkan KPUD agar mengedepankan penanganan yang baik bekerjasama dengan kepolisian. Pokja juga sudah dibuat untuk mengatur strategi sedemikian rupa.

5. Rifqi menjawab M. Surya

- Ini memang menjadi suatu dilemma, tapi keselamatan publik untuk saat ini perlu menjadi prioritas.

6. Dewa Raka menjawab Edo dan M. Surya

- *Sense of crisis* perlu dibangun dimulai dari diri sendiri sehingga memunculkan gerakan sosial. Persoalannya juga membangun disiplin.

Catatan :

1. **Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di <http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum>**
2. **Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber informasi dari "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute".**

~ TERIMA KASIH ~